



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
12. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
13. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
14. Akses Arsip adalah Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
15. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
16. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan.
17. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
18. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

19. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
20. Informasi yang dikecualikan adalah informasi apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.
21. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak
22. Pengawas adalah Pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan seperti Inspektur/Auditor pada Inspektorat, pengawas Intern pada Satuan Pengawas Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
23. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
24. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
  - a. mendorong Perangkat Daerah agar memberkaskan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
  - b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
  - d. melindungi arsip dinamis dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;

- c. menjamin tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- d. menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
- e. mewujudkan terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas dan pengorganisasian;
- b. pengamanan arsip dinamis; dan
- c. pembiayaan.

## BAB II ASAS DAN PENGORGANISASIAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sarana dan prasarana.

### Bagian Kedua Pengorganisasian

#### Pasal 5

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a. arsip dinamis yang tercipta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas dan rahasia;
- b. teknis pengamanan arsip dinamis dilakukan berdasarkan tingkat klasifikasi informasi arsip sebagaimana dimaksud huruf a;

- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. pengguna eksternal hanya dapat mengakses informasi Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

### BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

#### Bagian Kesatu Pengamanan

##### Pasal 6

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pencipta Arsip terhadap fisik arsip dan informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip dalam bentuk penyimpanan dan penyampaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan Arsip Dinamis dalam penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. Penentuan pengelola arsip;
  - c. Daftar arsip terbatas; dan
  - d. Daftar arsip rahasia.

#### Bagian Kedua Sarana

##### Pasal 7

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan

- d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

### Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

#### Pasal 8

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaannya.
- (3) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keempat Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

#### Pasal 9

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, antara lain:

- a. arsip dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. arsip dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. arsip dinamis pada Perangkat Daerah berbentuk Badan dan/atau Dinas;
- d. arsip dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. arsip dinamis pada lingkungan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Dinas.



## Pasal 10

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja daerah, meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

## Pasal 11

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan personal file;
- b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon, daftar arsip vital dan lain-lain;
- c. arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*, dan daftar arsip rahasia; dan
- d. arsip dinamis yang karena sifatnya menjadi arsip rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif.
- (2) Tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Penyimpanan dalam rangka pengamanan arsip dinamis dilakukan sesuai tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan memperhatikan media arsip.
- (2) Ketentuan penggunaan, prasarana dan sarana penyimpanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Penyampaian dalam rangka pengamanan arsip dinamis harus dilakukan sesuai tingkat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis dengan menggunakan media pengiriman yang dilindungi.
- (2) Prosedur pengiriman arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 5 November 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 81

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR 80 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. UMUM</b>						
	001	Lambang meliputi a. Garuda b. Bendera Kebangsaan c. Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) d. Bandir / Umbul-umbul	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak, 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Demak
	002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (Khusus untuk Non PNS) a. Bintang b. Satyalencana c. Satvakarva Nugraha d. Penghargaan Secara Adat e. Penghargaan Lainnva (Kalnataru. Unakarti. Adinura dsb)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak, 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Demak
	003	Hari Raya/ Besar a. Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb) b. Keagamaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	004	c. Hari Ulang Tahun /HUT (Hari Jadi Propinsi/Kab/Kota)  Ucapan meliputi a. Terimakasih b. Selamat c. Mohon Diri d. Bela Sengkawa e. Ucapan Lainnya	Biasa/Terbuka	akses  Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	dan Pemerintah Desa  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	TU pada masing-masing Perangkat Daerah;  2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak, 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Demak  1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak, 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Demak
	005	Undangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak, 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Demak
	006	Tanda Jabatan ( Pamongpraja dan Pejabat Lainnya )	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	010	URUSAN DALAM a. Gedung kantor, termasuk instalasi Listrik, Telepon, Otomasi, air minum, Hidraant, alarm, dan internet b. Rumah Dinas c. Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel) d. Rumah susun/ apartemen e. Peminjaman sarana prasarana kantor (ruang, gedung, kendaraan, LCD, Laptop dll) f. Pengurusan kendaraan dinas g. Keamanan/ Ketertiban kantor h. Kebersihan Kantor i. Protokol (Upacara bendera dan tata tempat ) j. Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden k. Audiensi l. Penerimaan Tamu m. Kerjasama n. Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pegguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;  2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak,  3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Demak
	020	BARANG DAN JASA a. Penawaran ( barang dan Jasa ) b. Barang ( Barang bergerak dan barang tidak bergerak )  c. Jasa	Biasa/Terbuka	Pegguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;  2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak,  3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten
						2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak,  3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelang a. Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan b. SPK, Kontrak/Amandemen / Addendum, Teguran c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) d. Serah terima pekerjaan e. Pemeriksaan Pekerjaan f. Perpanjangan waktu / force majeure g. Denda h. Sanggahan i. Pemeliharaan barang / jasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Demak 1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Setda Kabupaten Demak, 3. Bagian Pengadaan Barang / Jasa pada Setda Kabupaten Demak
	028	Inventaris a. Pendataan Barang Milik Negara b. Pemeliharaan Barang Milik Negara c. Penghapusan Barang Milik Negara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bidang Aset pada BPKPAD Kabupaten Demak
	028	KEKAYAAN DAERAH a. Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak) b. Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen/ bangunan bersejarah dll) c. Tanaman d. Alat-alat berat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
		e. Hewan f. Barang persediaan dalam gudang g. Alat pengangkut (darat, laut, udara) h. Peralatan pabrik/laboratorium i. Peralatan kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)				2. Bidang Aset pada BPKPAD Kabupaten Demak
	041	Perpustakaan a. Pameran Bahan Perpustakaan b. Pengolahan (Katalog, Bibliografi) c. Sirkulasi/Layanan d. Keanggotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	045	e. Peminjaman dan pengembalian f. Deposit g. Pemeliharaan, Pelestarian/alih media h. Pembinaan Perpustakaan i. Bantuan buku, rak j. Penghapusan/penyusutan bahan perpustakaan k. Jenis-jenis perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat) l. Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan m. Dokumentasi  Kearsipan a. Pola Klasifikasi b. Akuisisi Arsip c. Penyusutan Arsip d. Jadwal Retensi Arsip e. Penilaian Arsip f. Pemindahan Arsip g. Penyerahan Arsip h. Pemusnahan Arsip i. Pembinaan Kearsipan j. Pengawasan k. Bimbingan Kearsipan l. Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip m. Fumigasi dan Termit Control n. Laminasi o. Alih media p. Layanan q. Pemasarakatan r. Pameran s. Penerbitan Naskah Sumber Arsip t. Sosialisasi Kearsipan u. Pengembangan Kearsipan Sistem Kearsipan Sistem Jaringan Kearsipan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak
	046	Sandi	Terbatas	Dibatasi hanya	Memiliki dampak	Bidang Informatika dan



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Telegram, Telex, Radio, ISB b. Data elektronik		untuk penentu kebijakan, pengawasan, serta penegak hukum	yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Demak
	050	PERENCANAAN DAN EVALUASI meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), PRJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrebangpus antar Kementerian, Musrenbangnas, Musrenbangdes  RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RENSTRA (Rencana Strategis), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RENSTRA BAPPEDA Program Nasional  RKP (Rencana Kerja Pembangunan) RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Rencana Kerja Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Demak  2. Sekretariat / Bagian Umum/ Bagian Program dan Keuangan pada Perangkat Daerah
	050	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Bupati atas pandangan Fraksi Nota Keuangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) RKO (Rencana Kerja Operasional) Laporan Laporan Berkala LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Demak  2. Sekretariat / Bagian Umum/ Bagian Program dan Keuangan pada Perangkat Daerah
	052	Evaluasi Evaluasi Rencana Strategis Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Litbang/ Subbidang Pelaporan dan Evaluasi pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten  2. Sekretariat / Subbag Program dan Keuangan pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata Tertib Kantor, Jam Kerja, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai Organisasi Badan Non Pemerintah Organisasi Badan Internasional Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat/ Bagian Umum/ Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;  2. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Demak
	060	Ketatalaksanaan, Tata Naskah Dinas, stempel dinas dan stempel jabatan, papan nama instansi Pemerintah / Non Pemerintah, alamat-alamat kantor dan pejabat, ketentuan pakaian dinas dan atribut  Tata Hubungan Kerja Standart Operasional Prosedur Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja Pengukuran /Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional Uraian Jabatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada  2. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Demak
	070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Litbang pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Demak  2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	072	Pengembangan  Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. Bidang Litbang pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		SINAS (Sistem Inovasi Nasional)		mempunyai hak akses	Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	072	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster, Kab/Kota, Desa inovatif Inkubator Teknologi dan Bisnis	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Litbang pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada
		Pameran produk inovasi /Ristek BTC (Bisnis Teknologi Center) Raptekn (Penerapan Iptek) HKI (fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual) Kajian strategis/diskusi / Forum Group Discussion (FGD)  Seminar Workshop	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Litbang pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		Rapat Koordinasi/ Rapat Teknis Lokakarya Diseminasi/ sosialisasi hasil penelitian  Kerjasama Penelitian Perekayasaan Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Litbang pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	080	Konferensi/ Rapat Koordinasi Gubernur, Bupati/ Walikota, Komponen eselon lainnya ( termasuk pimpinan OPD ) Instansi lainnya ( diluar Kemendagri ), Internasional di Dalam Negeri, Internasional di Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				rahasia	uang Penerimaan Desa	1. Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda Kabupaten Demak 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Demak
	090	PERJALANAN DINAS ( Surat Perintah Tugas ( SPT), Surat Tugas dan SPPD, meliputi a. Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Daerah b. Perjalanan Menteri ke Daerah c. Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat eselon I) d. Perjalanan PNS, termasuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat e. Perjalanan Tamu Asing ke Daerah f. Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri g. Perjalanan Menteri ke Luar Negeri h. Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri i. Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah

## II. KEPEGAWAIAN

	800	Kepegawaian a. Perencanaan b. Penelitian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa	Sekretariat , Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak
		c. Statistik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa	Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak
	810	Pengadaan a. Pendaftaran CPNS (Testing, Screening, Pengumuman Tes dan Pemanggilan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa	Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak
		b. Pengujian Kesehatan	Rahasia	Dibatasi hanya	Memiliki dampak	

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pengangkatan CPNS (Pengangkatan CPNS Golongan I, II, dan III)		untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	
	820	Mutasi meliputi : a. Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I-III	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak
	820	c. Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji Eselon I-IV	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak
	820	d. Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji.	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak
	820	e. Kenaikan gaji Berkala PNS Golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Kepegawaian, Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	820	f. Kenaikan pangkat golongan I-IV g. Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan golongan I-IV h. Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi lain) i. Data sering dan Penempatan Kembali	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi, dan Bidang Kepegawaian,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		j. Penunjukan Tugas Belajar (Dalam Negeri, Luar Negeri, Tunjangan Belajar, Penempatan Kembali, Ijin Belajar) k. Wajib Militer				Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak  2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		Kedudukan a. Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak
		b. Penyesuaian Pangkat/Gaji PNS Golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak
		c. Penghargaan Ijasah (Pencantuman gelar)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak
	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI a. Tunjangan (Struktural dan Fungsional), Kehormatan, Dana Kematian (Uang Muka), Tambahan Penghasilan, Tunjangan Cacat b. Dana Taspen, Askes Bantuan Kesehatan, Bantuan Pendidikan c. Perawatan Kesehatan (Poliklinik, Klinik Konsultasi, Perawatan Dokter, Obat-Obatan, Keluarga Berencana) d. Perumahan PNS e. Dispensasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak
		Cuti meliputi:	Biasa/Terbuka	Pengguna dari	Tidak memiliki	1. Bidang Kepangkatan,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Tahunan b. Besar c. Sakit d. Bersalin e. Alasan Penting f. Di Luar Tanggungan Negara		Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak  2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		PENILAIAN a. Penghargaan (Bintang/Satyalencana Karya Satya, Kenaikan Pangkat Anumerta, Hadiah berupa Kenaikan Pangkat, Pegawai Teladan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak
		b. Hukuman (ringan, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak  2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		c. Konduite / DP3	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak  2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		d. Ujian dinas tingkat I dan III	Biasa/Terbuka	Pengguna dari	Tidak memiliki	1. Bidang Kepangkatan,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak  2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		e. Penilaian Kinerja (Struktural dan Fungsional)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		f. Rehabilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak
		Tata Usaha Kepegawaian meliputi : a. Formasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		b. Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				akses	dan Pemerintah Desa	2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		c. Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian (NIP (Nomor Induk Kepegawaian) , KARPEG (Kartu Pegawai) , Legitimasi (Tanda Pengenal), Daftar Keluarga, KARSU/KARIS (Kartu Suami/Kartu Istri)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		d. Legitimasi / Tanda Pengenal ( Tanggal lahir, Penggantian Nama )	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak
		e. Kewenangan mutasi kepegawaian (Pelimpahan Wewenang, Spesial)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak
		f. KORPRI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		Pemberhentian meliputi :	Biasa/Terbuka	Pengguna dari	Tidak memiliki	1. Bidang Pendidikan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Permintaan sendiri termasuk pengunduran diri		Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak
		b. Dengan Hak Pensiun Golongan PNS Golongan I-IV, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Yatim Piatu , Uang Muka Pensiun	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		c. Karena Meninggal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		d. Alasan Lain, diantaranya keuzuran jasmani	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	880	e. Tidak Dengan Hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak
	880	f. Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas dan tali asih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Kepangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian pada BKPP Kabupaten Demak
	890	Pendidikan Pegawai a. Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat b. Pendidikan Prajabatan c. Pendidikan Dalam Prajabatan (Diklat PIM, Diklat Teknis, Diklat Fungsional) d. Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis e. Pengembangan Pegawai (Tugas Belajar, Ijin Belajar, Tunjangan Belajar, Bantuan Pendidikan, Penempatan Kembali) f. Metode (Kuliah, Ceramah/Symposium, Diskusi, Kuliah Lapangan/OL, Widya Wisata, KKN, Kurikulum, Karya Tulis) g. Tenaga Pengajar h. Administrasi Pendidikan i. Fasilitas Pendidikan j. Sarana Pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan , Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Umum dan Kepegawaian / Bagian TU pada Perangkat Daerah
<b>III. KEUANGAN</b>						
	900	Keuangan a. Nota Keuangan b. APBN c. APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan	1. Bidang Anggaran pada BPKPAD Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	910	<p>Anggaran</p> <p>a. Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan OPD/PPKD, Keputusan Bupati tentang penunjukan pemimpin,</p> <p>b. DPA/DPPA/DPAL-OPD /PPKD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran</p> <p>c. Anggaran Kas</p> <p>d. Surat Penyediaan Dana (SPD)</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Bidang Anggaran pada BPKPAD Kabupaten Demak</p> <p>2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah</p>
	920	<p>Akuntansi</p> <p>a. Laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Akuntansi pada BPKPAD Kabupaten
	930	<p>Perbendaharaan</p> <p>a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p> <p>b. Surat Penolakan Penerbitan SP2D</p> <p>c. Daftar Penguji SP2D</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKPAD Kabupaten
	940	Pembinaan Kebendaharaan yaitu Bimtek-Bimtek / Kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Bidang Anggaran pada BPKPAD Kabupaten Demak</p> <p>2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah</p>
	950	<p>Pengelolaan Kas Daerah</p> <p>a. Laporan pemotongan IWP, Taperum, PPH 21 dari gaji</p> <p>b. Laporan rekapitulasi penerimaan daerah</p> <p>c. Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (PPN/PPH) dari</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKPAD Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		CV, PT, atau instansi d. Surat tanda setoran (STS) e. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah f. Rekonsiliasi meliputi surat rekonsiliasi penerimaan, laporan rekonsiliasi Bank		hukum		2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah
		g. Laporan mutasi penempatan deposito h. Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKPAD Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	960	Evaluasi dan Pengendalian meliputi tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan, evaluasi dan perubahan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Anggaran pada BPKPAD Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	970	PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21) Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam / Migas Subsidi Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Diatas Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan Pajak reklame	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. Bidang Pendapatan pada BPKPAD Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	970	Retribusi Bidang Kesehatan, Bidang Seni Budaya dan Pariwisata, Bidang Perekonomian, Perindustrian, dan Perdagangan ( termasuk pasar ) Retribusi Bidang Pertanian, dan Peternakan (termasuk pemotongan hewan) Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir, dll).	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pendapatan pada BPKPAD Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	970	Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna, dll) Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan Retribusi Bidang Pertambangan Retribusi Pemanfaatan Air permukaan dan metrolog Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pendapatan pada BPKPAD Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	970	Bea meliputi balik nama kendaraan bermotor, balik nama kendaraan diatas air, cukai, pungutan Retribusi Bunga Deposito Bungan Tabungan Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau kehilangan Kekayaan Daerah ( TP-TGR ) Sumbangan Pihak Ketiga ( Dealer, Kayu ) Penerimaan lain-lain Penerimaan kembali kredit BKK Ternak tidak layak bibit Sewa Internet Penerimaan Dari Dana bergulir Revolving Kerjasama dengan BUMIDA Penerimaan DUKS ( Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri )	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pendapatan, Bidang Aset Daerah pada BPKPAD Kabupaten Demak 2. Sekretariat / Bagian Umum/ Subbag Program dan Keuangan / Bagian TU pada Perangkat Daerah
	970	Bantuan meliputi bantuan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati,	Biasa/Terbuka	Pengguna dari	Tidak memiliki	Bidang Pendapatan pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		lainnya		Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	BKPAD Kabupaten Demak
	970	Pendapatan lainnya meliputi: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Pelepasan hak atas tanah Penjualan rumah jabatan / Rumah dinas Penjualan kendaraan dinas roda 2 Penjualan kendaraan dinas roda 4 Penjualan bongkaran bangunan dan inventaris Penjualan drum bekas Penjualan hasil penebangan pohon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pendapatan, Bidang Aset Daerah pada BKPAD Kabupaten Demak

BUPATI DEMAK

ttd

HM. NATSIR

**B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. PEMERINTAHAN</b>						
	130	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA , Monografi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbatas	Dibatasi hanya	Memiliki dampak	Bagian Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	130	Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Bupati / Walikota (LKPJ) Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah Instansi vertikal Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar negeri (Sister City) Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Wakil Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, meliputi Muspida	Terbatas	untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Setda Kabupaten Demak
	130	Pembentukan Daerah Otonom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Pembentukan Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Pemekaran wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Permasalahan Batas wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya	Memiliki dampak	Bagian Pemerintahan



<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Setda Kabupaten Demak
	130	Pemindahan Ibukota Kabupaten/ Kotamadya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Pembagian Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Pembagian Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Penyerahan Urusan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak
	130	Pemerintahan Wilayah Kecamatan, meliputi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pembentukan Kecamatan Pembentukan Kecamatan Pemekaran Kecamatan Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan Pemindahan Ibukota Kecamatan		internal yang mempunyai hak akses	mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	
	140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN Pamong Desa (meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Kepala Desa, Kelurahan meliputi Pencalonan, Pemilihan, Biaya Pemilihan Kepala Desa Lembaga Musyawarah Daerah, meliputi Pembentukan, Keanggotaan, Kepengurusan dan kegiatan LMD Perangkat Desa, Kelurahan Sekretaris Desa, kelurahan meliputi Pencalonan, Penyeleksian, Kepala Dusun, meliputi Pencalonan, Penyeleksian, Pengangkatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak
	140	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes/Kel) Rutin (termasuk penghasilan pamong Desa) Pembangunan Anggaran Belanja Tambahan Pendapatan Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak
	140	Urusan Desa Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang Penerimaan dari Pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa Pendapatan asli Desa Penerimaan lain-lain yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-Hasil dari gotong royong masyarakat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak
	140	Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok, tanah titisar, tanah penganggonan, tanah desa lainnya, Jalan desa, bangunan desa, kekayaan desa.	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES P2KB

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				akses	dan Pemerintah Desa	Kabupaten Demak
	140	Lembaga-lembaga tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD dll	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES dan KB Kabupaten Demak
	140	Adminitrasi Desa/Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak
	140	Kewilayahan meliputi pemekaran wilayah desa / kelurahan, Pembentukan Desa/ Kelurahan, Perubahan batas wilayah / Perluasan Desa / kewilayahan, perubahan nama-nama Desa / Kelurahan, permasalahan batas desa, penyatuan Desa / Kelurahan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak 2. Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak
	140	Pembangunan Desa meliputi; a. Pembinaan Usaha gotong royong, Swadaya gotong royong, Lembaga Sosial Desa ( LSD ), Latihan Kerja Masyarakat, Penyuluhan, Kelembagaan Desa b. Perekonomian Desa, Produksi Desa, keuangan desa, koperasi desa, penataan bantuan pembangunan desa, alokasi bantuan pembangunan desa, pelaksanaan bantuan pembangunan desa c. Prasarana Desa; pembinaan , bimbingan teknis, pemukiman kembali penduduk, masyarakat pra desa, pemugaran perumahan dan lingkungan desa d. Pengembangan Desa ; tingkat perkembangan desa, Unit Daerah kerja Pembangunan (UDKP), tata desa, perlombaan desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kawasan Pedesaan pada DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak
	140	Koordinasi sektor khusus (K), rapat koordinasi Horizontal (RKH), Tim koordinasi pusat, kerjasama	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan	Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES P2KB

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum	Pemerintah Desa	Kabupaten Demak
	140	RT – RW/ RK	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pemerintah dan Administrasi Desa pada DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak
	170	DPRD KABUPATEN/ KOTA Keanggotaan Pencalonan Pangkat dan Pengambilan Sumpah Pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak
	170	Pemberhentian Antar Waktu Meninggal Dunia Mengundurkan Diri Diberhentikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak
	170	Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Badan Musyawarah Komisi Badan Legislasi Daerah Badan Anggaran Badan Kehormatan Alat Kelengkapan lain (Pansus)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak
	170	a. Persidangan : rapat-rapat, rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat pimpinan DPRD, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat badan legislasi, rapat badan kehormatan, rapat pansus, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat konsultasi, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat pemandangan umum, rapat fraksi b. Fraksi ( tata tertib dan kode etik )	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Peradilan Agama Islam ( Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Islam, Mahkamah Agama Islam Agung ) c. Peradilan Militer ( Mahkamah Militer Tingkat Pertama, Mahkamah Militer Tinggi, Mahkamah Militer Agung ) d. Peradilan Tindak Pidana Korupsi e. Peradilan Hak Asasi Manusia f. Mahkamah Konstitusi g. Komisi Yudisial h. Ombusmen				
	180	Upaya Hukum Banding Kasasi Derden Verzet Peninjauan Kembali Grasi, Amnesti, Abolisi Eksekusi Pembinaan Hukum Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM) Kajian Hukum / Peraturan Perundang-undangan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bantuan Hukum, Meliputi LBH Lembaga Bantuan Hukum Hukum Internasional Imigrasi Visa Pasport				Kewenangan pusat
		Exit Reentry Lintas Batas / Batas Antar Negara Kependudukan Registrasi narapidana Pembinaan narapidana Pembebasan narapidana				
	180	Tahanan titipan Kejaksaan Penuntut Umum Penuntut Khusus Hukum Adat				Kewenangan pusat
	200	POLITIK Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan	Sekretariat, Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Kesbangpolinmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Keadaan Politik Luar Negeri Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbudhankam  Orde Baru Orde Reformasi		serta penegak hukum	Pemerintah Desa	Kabupaten Demak
	210	KEPARTAIAN Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/ Musda PARPOL Struktur / Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL Data Inventaris dan Keuangan PARPOL Partai / Organisasi Terlarang Keputusan Pembubaran Partai / Organisasi Terlarang Daftar dan Data Pengurus Anggota Partai Organisasi Terlarang Ijin Meninggalkan Tempat atau Domisili bagi Anggota Partai / Organisasi Terlarang Daftar Berkala Mengenai Keadaan Organisasi / Anggota Partai / Organisasi Terlarang Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai / Organisasi Terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi Program Kerja Organisasi Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota Pembinaan Organisasi Kegiatan Organisasi dan pelaporannya Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi Program Kerja Organisasi Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota Pembinaan Organisasi Kegiatan Organisasi dan pelaporannya Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	240	ORGANISASI PEMUDA Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Sekretariat, Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi Program Kerja Organisasi Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota Pembinaan Organisasi Kegiatan Organisasi dan pelaporannya Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi		pengawasan serta penegak hukum	Daerah dan Pemerintah Desa	Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi Program Kerja Organisasi Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota Pembinaan Organisasi Kegiatan Organisasi dan pelaporannya Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	260	ORGANISASI WANITA Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi Program Kerja Organisasi Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota Pembinaan Organisasi Kegiatan Organisasi dan pelaporannya Daf	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA Pencalonan, Pemilihan Bupati / Walikota Nomor Urut/ Tanda Gambar Kampanye Dana Kampanye Petugas Pemilu ( KPU Kabupaten, PPK/ Panitia Pemilihan Pemilih/ Daftar Pemilih , pemutakhiran data, Bahan DPS ( terkait DP4 / Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu dari Kependudukan, DPS ( Daftar Pemilih Sementara ), DPSHP ( Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ), DPT ( Daftar Pemilih Tetap )  Sarana (TPS, Kendaraan, Surat suara, kotak suara, logistik )  Pemungutan Suara / Penghitungan Suara Hasil Pemilu Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif  Penetapan Pemenang Pilkada	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	280	PENGAWASAN PEMILU / PILKADA	Terbatas	Dibatasi hanya	Memiliki dampak	Sekretariat, Seksi



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemantauan Pelanggaran Sengketa Panwaslu Kabupaten PPL (Petugas Pengawas Lapangan)		untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Satpol PP Kabupaten Demak
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan Pemerintah mengenai Situasi dan Kondisi Keamanan  Pembinaan dan Pengaturan mengenai Larangan Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan / Ancaman Keamanan Program Kerja serta Tata Cara Penanggulangan Keamanan  Laporan dari Instansi yang Berwenang Pengamanan Sidang (Tamu Negara) Pengawalan Pejabat Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum , Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Demak
	300	Laporan adanya kejadian teroris				Kewenangan POLRI
	300	Pengawasan Trantibum Penegakan pelaksanaan Perda Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda Patroli Wilayah Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing Pengamanan Pengawalan Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum , Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Demak
	310	PERTAHANAN Darat Laut Udara Ketahanan Bangsa Ketahanan Ekonomi Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan kemasyarakatan				Kewenangan pusat
	320	KEMILITERAN/ TNI				Kewenangan pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Latihan Militer Wajib Militer Operasi Militer Kekayaan ABRI Pejabat Sipil dari ABRI klasifikasikan Dwifungsi Kemanunggalan TNI dengan rakyat				
	330	KEAMANAN Kepolisian Senjata Api / Tajam Hura-hura / Demonstrasi Bahan Peledak Perjudian Surat-surat Kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan				Kewenangan POLRI
		Polisi Pamong Praja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum , Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Demak
	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kebijakan Pemerintah mengenai Pembentukan Mawil dan Pengangkatan / Pemberhentian Anggota Hansip Pengerahan dan Pengendalian Hansip Kegiatan Pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa Pembinaan Anggota Hansip / Linmas Penghargaan Anggota Hansip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Demak 2. Seksi Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak
	340	Hansip / Linmas Lanjut Usia Data Matrik Hansip dan Menwa Pendidikan / Latihan Hansip dan Menwa Latihan Ketrampilan PAM Swakarsa Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tokoh Masyarakat  Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tokoh Pemberian Tali Asih bagi Anggota Pembinaan dan Diklat Pengangkatan / Pemberhentian Anggota Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Demak 2. Seksi Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesbangpolinmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	350	Pendidikan / Latihan Linmas Pelatihan PAM Swakarsa Pendidikan / latihan MENWA Pengerahan dan Pengendalian Linmas Kesejahteraan bagi anggota Linmas Pemberian Tali Asih bagi Anggota Linmas Bantuan Modal Usaha bagi Anggota Linmas Santunan uang duka bagi anggota Linmas Penghargaan Anggota Linmas KEJAHATAN Makar / Pemberontakan / terosme Pembunuhan Penganiayaan, Pencurian / Perampasan Subversi / Penyelundupan / Narkotika Penipuan dan Pemalsuan Uang Ijazah Kejahatan Pemalsuan lainnya Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan Korban Kenakalan Kenakalan Remaja/Pelajar, Razia, Penyuluhan Perselingkuhan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kewenangan POLRI  Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DINSOS P2PA Kabupaten
		Kejahatan lainnya (Traficking, Hipnotis, dll)				Kewenangan POLRI
	360	BENCANA Pelatihan, Posko Bencana Surat Keputusan Berita Acara, MOU Pemerintah Pusat BNPB Gunung Berapi / Gempa / Tsunami Banjir / Tanah Longsor, Angin Topan, Kebakaran Pemadam Kebakaran Kekeringan Posko Bencana Koordinasi / Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Demak 2. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan Ketrampilan Penyelamatan di Air dan Menyelam  Pelatihan Managemen bagi Pejabat Satkorlak dan Satlak PBP Pelatihan Kemampuan Pusdalop bagi Aparat PBP Latihan Ketrampilan Pemadam Kebakaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Demak
	370	Kecelakaan Darat, Laut, Udara Inventigasi/ penyelidikan Kecekaan Asuransi Kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Demak
	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Perencanaan Perencanaan Teknis Rekomendasi Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi PUSDALOPS Kunjungan Lapangan Relawan Laporan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat , Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Demak
	390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN Instansi Pemerintah Pusat Instansi Pemerintah di Daerah Lembaga Internasional Lembaga non pemerintah nasional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat pada BPBD Kabupaten Demak
	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak Asuh Orang Tua Asuh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat , dan Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						dan Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Pembinaan Usaha Gotong Royong : Swadaya gotong royong, Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD); Pembinaan, klasifikasi, Proyek, Musyawarah Latihan Kerja Masyarakat ( Kader masyarakat, Kuliah Kerja Nyata / Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ( Program, Pembinaan Penyuluhan ( Publikasi, Peragaan, Sosio Drama, Siaran pedesaan, Kelembagaan Desa ( Kelompok tani, rukun tani, subak, dharma tirta Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang pada DINPERMASDES P2KB Kabupaten 2. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Demak
	410	Perekonomian Desa Produksi Desa ( Pengolahan, Pemasaran ) Pembiayaan Pembangunan Desa ( Inventarisasi data, petunjuk / pembinaan pelaksanaan, pelaksanaan dan perkembangan pembangunan, bantuan/ simulasi, perkreditan desa, pelaporan , Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ( PNPM-MP )  Koperasi Desa ( Badan Usaha Unit Desa /BUUD, Koperasi Usaha Unit Desa / KUD ) Penataan Bantuan Pembangunan Desa ( Jumlah desa yang diberi Alokasi Bantuan Pembangunan Desa ( Pusat, Daerah ) Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ( Bantuan Langsung,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa , Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kawasan Perdesaan pada DINPERMADES P2KB Kabupaten 2. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Demak
	410	Sarana dan Prasarana Desa Prasarana Desa ( Pembinaan, Bimbingan Teknis ) Pemukiman Kembali Penduduk ( Lokasi, Diskusi, Pelaksanaan )  Masyarakat Pradesa ( Pembinaan, Penyuluhan ) Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa ( Rumah Sakit, Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa , Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kawasan Perdesaan pada DINPERMADES dan KB Kabupaten Demak 2. Subbagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	410	Pengembangan Desa Tingkat Perkembangan Desa ( Jumlah Desa, Pemekaran Desa, Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbag Kecamatan ( Tata Desa/ Profil Desa dan Kelurahan ( Inventarisasi, Penyuluhan Perlombaan Desa ( Pedoman, Penilaian, Kejuaraan, Piagam )	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa , Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kawasan Perdesaan pada DINPERMADES P2KB Kabupaten Demak
	410	Koordinasi Sektor khusus (K) Rapat Koordinasi Horisontal Team Koordinasi Pusat (TKP) Kerjasama ( Luar Negeri , Perguruan Tinggi ) Kementerian / Lembaga Pemerintah Lembaga Lainnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMADES dan KB Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	410	Bantuan Langsung ke Masyarakat (Bantuan Langsung Tunai/BLT, Jaminan Kesehatan Masyarakat (perawatan, persalinan, pengobatan Jaminan Pendidikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada DINSOSP2PA Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial, Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	420	PENDIDIKAN Kebijakan dan program Pemerintah untuk pendidikan Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalis Pendidikan Kemasyarakatan, (PKBM dll)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang pada DINDIKBUD Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	420	<p>Sarana Pendidikan (termasuk akreditasi) Pra Sekolah (PAUD /Pendidikan Anak Usia Dini / Playgroup, Taman Kanak-kanak / TK) Sekolah Dasar Sekolah Menengah Sekolah Kejuruan Perguruan Tinggi Kegiatan Sekolah Dies Natalies, Lustrum Kegiatan Pelajar diantaranya Reuni, Darmawisata, widyawisata, Lomba-lomba :LKS. Olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains) Pelajar Teladan, Pertukaran Pelajar)</p> <p>Sekolah Pendidikan Luar Biasa Pendidikan non formal ( Taman Baca Masyarakat ) Pendidikan Luar Sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang pada DINDIKBUD Kabupaten Demak
	420	<p>Adminitrasi Sekolah Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian Pendaftaran, OSPEK</p> <p>Tahun Pelajaran Hari Libur Penyusunan RKT, RKAS PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ) Surat Keterangan Pengganti Ijazah Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang pada DINDIKBUD Kabupaten Demak
	420	<p>Uang Sekolah diantaranya SPP, SPI Bea siswa dan penghargaan siswa berprestasi Ijazah, sertifikat Kurikulum Karya Tulis, Karya ilmiah, Jurnal Ujian</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat, Bidang pada DINDIKBUD Kabupaten Demak</li> <li>2. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak</li> </ol>
	420	<p>Metode Belajar Kuliah Ceramah, Simposium, Seminar Diskusi Kuliah Lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata), Magang/Praktek/PKL</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang pada DINDIKBUD Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	420	Tutor, Pamong Belajar, Tenaga Pengajar Guru, Dosen, Dekan, Rektor, Guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi  Pertukaran Guru/dosen ke Luar Negeri Sertifikasi Guru Bimbingan Teknis / Pelatihan bagi guru (TK,SD,SMP) Seleksi Kepala Sekolah/ Diklat Kepala Sekolah ( Cakasek TK, SD, SMP ) PTK berprestasi ( Pendidikan dan Tenaga Kependidikan )	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan pada DINDIKBUD Kabupaten Demak
	420	Sarana Pendidikan Bangunan Pendidikan ( Gedung sekolah, Kampus, Pusat kegiatan, Buku Perlengkapan sekolah Sistem Informasi Pendidikan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang pada DINDIKBUD Kabupaten Demak
	426	Keolahragaan Pembinaan keolahragaan ; Olah Raga Prestasi ( PON, Sea Games, Sarana Prasarana keolahragaan ( Peralatan Olah Raga, Kemitraan Olah Raga Pesta Olah Raga meliputi PORSENI ( Pekan Olah Raga dan Seni ), Hobby	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan Olahraga pada DINPORA Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	427	Kepemudaan Pertukaraan Pemuda Paskibraka Sarana Prasarana kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : Kemitraan pemuda Karang Taruna Kepramukaan/Kepanduaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan pada DINPORA Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	430	KEBUDAYAAN Kebijakan dan program Pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan Kesenian Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni musik, seni	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan Kebudayaan pada DINDIKBUD Kabupaten Demak



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Sarana ( Gedung kesenian, Padepokan, Lembaga adat, Kegiatan Kepurbakalaan Museum Peninggalan Kuno ( Candi, termasuk pemugaran, Benda )</p> <p>Sejarah dan nilai tradisional Bahasa Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan Festival, Pentas Seni Cagar Budaya Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara dll) Tempat Pemerintahan ( istana, kerajaan dll) Makam (Tokoh agama, Tokoh Pemerintahan dll)</p>				2. Subbagian Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	430	Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Sekretariat, Bidang Pembinaan Kebudayaan pada DINDIKBUD Kabupaten Demak</p> <p>2. Subbagian Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak</p>
	440	KESEHATAN Kebijakan dan program Pemerintah untuk kesehatan Pembinaan Kesehatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten</p> <p>2. Sekretariat, Bidang pada RSUD Kabupaten Demak</p>
	440	<p>Jiwa Perawatan Obat-obatan Pengadaan Penyimpanan Obat Pengawasan Obat Obat Terlarang Kelamin, HIV, AIDS, IMS Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan IGD IBS ICU</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada DINKES Kabupaten Demak</p> <p>2. Bidang Pelayanan pada RSUD Sunan Kalijaga Demak</p> <p>3. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		MCU (Medhical Chek Up) Farmasi Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik				Setda Kabupaten Demak.
	440	Bank Darah Rumah Sakit Sanitasi Rumah Sakit CSSD/Laundry Kasus Hukum Rumah Sakit Tenaga Medis Perencanaan Tenaga Medis Perijinan untuk Tenaga Medis Standarisasi Alat Kesehatan Penyimpanan Alat Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada DINKES Kabupaten Demak 2. Bidang Pelayanan pada RSUD Sunan Kalijaga Demak 3. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak.
		Rekam Medik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pemasaran dan Rekam Medis pada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	440	Gigi Mata Kesehatan Ibu dan Anak JPSBK (Jaminan Pengamana Sosial Bidang Kesehatan) JAMKESMAS JAMKESDA JAMPERSAL BPJS Jaminan Lainnya Pemeriksaan Obat Distribusi Obat Obat Generik T.B.C	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) pada Dinas 2. Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Pemasaran dan Rekam Medis pada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten
		Kusta Frambusia				3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kholera SARS, dan jenis penyakit lainnya Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang Malaria Dengue Haemorrhagie Fever (Demam berdarah, DHF) Filaria  Serangga				pada DINSOS P2PA Kabupaten Demak 4. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	440	Rabies Antrak Leptosirosis Chikungunya Penyakit Lainnya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular sumber Binatang A. Pektoris IMA (Irama Mastcmik Akut) Hipertensi Stroke Diabetes Militus (DM) Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. Serviks Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. Mammae Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. Hepar Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. Paru, dan Penyakit	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 2. Bidang Pelayanan pada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak 3. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak.
	440	Epidemiology dan Karantina (Epidka) Imunisasi Surveilanse Pestisida Pencemaran Udara Jamban Keluarga Kesehatan Institusi Higiene Sanitasi Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan, minuman Sarana Air Minum Pestisida, Insektisida Pencemaran Jamban Keluarga, sanitasi rumah tangga Kesehatan institusi, misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 2. Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Pemasaran dan Rekam Medis, Bidang Keperawatan pada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak
		Higiene Sanitasi CA. Mammae Higiene Sanitasi CA. Hepar Higiene Sanitasi CA. Paru Kejadian Khusus Dekompensatiokordosis (serangan jantung)				3. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	Asma Psikosis PPOM Kecelakaan Lalu Lintas Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi dan Pengawasan Makanan Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk Keracunan Makanan Menu Makanan Rakyat Gondok Endemik (GAKI) Keperawatan Komite Medik RSUD, RSJ, RS Khusus Rawat Inap Rawat Jalan Penunjang medis Radiologi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten 2. Bidang Pemasaran dan Rekam Medis , Bidang Keperawatan pada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak
		Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis Pendidikan dibidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis  Peralatan Kesehatan Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan Pengobatan Alternatif/Tradisional Pijat Tusuk Jarum / Akupuntur				3. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak.
	440	SPI (Satuan Pengawas Internal) ISO PSBH (Problem Solving for Better Hoepital) Jamu Tradisional/ Herbal Dukun Bekam Lembaga Penyedia layanan kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Keliling	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan , Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit Menular

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu ( Posyandu Ibu Hamil dan Balita, Posyandu Lansia )  Laboratorium Kesehatan Apotik Sanatorium Kesehatan Kanker Kesehatan masyarakat meliputi : Penyuluhan Kesehatan Pemalsuan Obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Pencegahan Penyakit Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L) Laboratorium Klinik				----- (P2PM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 2. Tim SPI dan Mutu, Tim ISO, Bidang Pelayanan pada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak 3. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak.
	450	AGAMA Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan				Kewenangan pusat
		Bantuan di bidang keagamaan Islam Peribadatan ( Sholat, Zakat, Puasa, Haji/Umroh ) Infaq, shodaqoh Rumah Ibadah (Masjid, Mushola, Surau) Tokoh agama Pendidikan Agama Pendidikan Tinggi Agama Menengah, MTs. MA Dasar, Pra Sekolah, MI Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/Marasah Diniyah, Pondok Sarana Pendidikan meliputi, buku, alat peraga pendidikan, gedung	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Kewenangan Pusat 2. Subbagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	450	Tenaga Pengajar Dakwah (Pengajian, MTQ, Istigosah dll) Organisasi / Lembaga keagamaan Harta Agama Wakaf, Baitulmal dsb Mazhab Agama Islam Organisasi Keagamaan bukan Politik, (Majelis Ulama, Dewan Hisab R Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'I, Kyai, Ustdaz dll) Kristen Protestan ( Peribadatan, Rumah Ibadah Gereja dll, Tokoh agama, Rohaniawan( Pendeta, Domine, dll), Mazhab Agama Kristen Protestan, Organisasi gerejani ) Katholik (Peribadatan Rumah Ibadah Gereja dll, Tokoh Agama, Rokhaniawan, Pastur, Mazhab Agama Khatolik , Organisasi gerjani )	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Kewenangan pusat 2. Subbagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	460	HINDU (Peribadatan , Rumah Ibadah Pura dll, Tokoh Agama, Rohaniawan, Mazhab, Organisasi Agama Hindu ) BUDHA Peribadatan , Rumah Ibadat Candi, Vihara dll, Tokoh Agama, Rokhaniawan, Mazhab, Organisasi Agama Budha ) KONG HU CU Peribadatan, Rumah Ibadat Klenteng, dll, Tokoh Agama, Rokhaniawan, Mazhab, Organisasi Agama Kong Hu Cu )	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial pada DINSOS P2PA Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	460	SOSIAL Rehabilitasi Penderita Cacat Cacat Ganda Cacat Fisik Cacat Mental Rehabilitasi Sosial Gelandangan / Orang terlantar, anak jalanan Pengemis Tuna Susila Anak Nakal Tuna Wisma Lanjut Usia	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial pada DINSOS P2PA Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	460	Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll Sumbangan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada DINSOS P2PA 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Demak
	460	Keperintisan dan Kepahlawanan Pahlawan Meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan Perintis kemerdekaan Meliputi pembinaan, penghargaan kepada Cacat Veteran Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada DINSOS P2PA Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	460	Korban Bencana Jaminan Sosial Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, Panti Asuhan Panti Wredha Bimbingan Sosial Masyarakat Suku Terasing meliputi : Bimbingan Pendidikan, PMI Makam Umum Pahlawan Khusus Keluarga, Raja Krematorium	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada DINSOS P2PA Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	460	Kesejahteraan anak dan keluarga Kesejahteraan Anak Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Perlindungan Anak Anak Asuh Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan Ibu Teladan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DINSOS P2PA Kabupaten Demak 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kependudukan Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada DINDUKCAPIL Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	470	<p>Biodata Penduduk / Data Pribadi Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Advokasi Identitas Penduduk Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia ( Perpindahan Penduduk WNI, Perpindahan Penduduk WNA dalam Wilayah Indonesia, Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara, Daerah terbelakang, Bedol Desa ) Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional) meliputi Penduduk Indonesia ke Luar Negeri; Orang asing tinggal sementara, orang asing tinggal tetap, Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara ( lintas batas internasional ) Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan meliputi Akibat bencana alam, akibat kerusuhan sosial, pendaftaran penduduk daerah terbelakang, pendaftaran penduduk rentan</p>	Biasa/Terbuka	akses	dan Pemerintah Desa	
	470	<p>Pencatatan Sipil Kelahiran, Kematian dan Advokasi Perkawinan, Perceraian dan advokasi ( Perkawinan agama islam, Perkawinan agama non Islam, Perceraian agama Islam, perceraian agama non Islam, Advokasi ) Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi Pencatatan Kewarganegaraan ( akibat perkawinan, akibat kelahiran, non perkawinan / non kelahiran, naturalisasi, Perubahan WNI ke WNA )</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pencatatan Sipil pada DINDUKCAPIL Kabupaten Demak
	470	<p>Informasi Kependudukan Teknologi informasi Pengolahan data Kependudukan meliputi Pendaftaran penduduk, kejadian vital penduduk, penduduk non registrasi, Pelayanan informasi kependudukan ) Perkembangan Penduduk Pengarahan kuantitas penduduk ( struktur jumlah, komposisi, fertilitas, kesehatan reproduksi, morbiditas Penduduk, Mortalitas Pengembangan Kuantitas penduduk ( Anak dan remaja, Penduduk usia produktif, Penduduk lanjut usia, gender) Penataan persebaran penduduk ( Migrasi antar wilayah . Urbanisasi Perlindungan dan pemberdayaan penduduk Pengembangan wawasan kependudukan</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada DINDUKCAPIL Kabupaten Demak



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	470	<p>TRANSMIGRASI</p> <p>Penyiapan Informasi Daerah Transmigrasi</p> <p>Informasi Potensi Peluang Bekerja dan Berusaha di Daerah</p> <p>Perbandingan Potensi Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi</p> <p>Pemasyarakatan / Sosialisasi Transmigrasi</p> <p>Peran Serta Lembaga dan Instansi terkait serta Media Massa dalam Publikasi Transmigrasi melalui Pameran dan Kesenian</p> <p>Bimbingan dan Penyuluhan Transmigrasi bagi Masyarakat Daerah</p> <p>Kerjasama di Bidang Transmigrasi</p> <p>Kepulauan Transmigran karena Daerah terjadi Konflik</p> <p>Permukiman Transmigrasi</p> <p>Penggunaan Tanah Permukiman Transmigrasi</p> <p>Pengembangan, Struktur Wilayah dan Analisis Data Wilayah</p> <p>Tata Ruang Satuan Kawasan Pengembangan, Study Kelayakan dan Teknis Ruang Satuan Pemukiman dan Lokasi / Peta Informasi</p> <p>Standarisasi dan Spesifikasi Teknis Rumah Transmigran Fasilitas Tanah Permukiman, Pengadaan Areal Tanah dan Pembebasannya, Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Permukiman Transmigrasi</p> <p>Tata Ruang Pemukiman Transmigrasi</p> <p>Rancangan dan Kemanfaatan Areal Tanah</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Peatihan dan Produktivitas pada DINAKERIND Kabupaten Demak</p> <p>2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak</p>
	470	<p>Rancangan Kapling TSM</p> <p>Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan, Lahan Usaha</p> <p>Penyelesaian Kekurangan Lahan Usaha kepada Transmigran dan Inventarisasi Penataan Kembali dan Penggunaan Areal Tanah</p> <p>Pengukuran Batas Unit Pemukiman</p> <p>Penyelesaian Perubahan Areal dan Urusan Perijinan pemanfaatan Sarana Pemukiman Transmigrasi</p> <p>Pembinaan, Pengendalian, Penyiapan Bangunan Rumah</p> <p>Pembinaan dan Pengendalian Penyiapan Sarana Air Bersih</p> <p>Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Sumber Energi</p> <p>Pembinaan dan Pengendalian Peningkatan Sarana</p> <p>Pembinaan, Pengendalian dan Teknis Peningkatan Potensi Lahan</p> <p>Pengarahan, Pemindahan dan Penempatan</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Peatihan dan Produktivitas pada DINAKERIND Kabupaten Demak</p> <p>2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak</p>
	470	<p>Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengerahan dan Penempatan</p> <p>Teknis Penyuluhan dan Motivasi dalam Pengerahan dan</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	<p>1. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Peatihan dan</p>



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	470	Pembinaan rokhani Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama Bimbingan adaptasi masyarakat Bimbingan pelaksanaan mnumbuhan interaksi sosial Pelayanan pos di daerah transmigrasi Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan Penilaian transmigran teladan Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Subbagian Kesejahteraan Sosial , Subbagian Bina Mental Spriritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	470	Keluarga Berencana Alat kontrasepsi Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri Penyuluhan lapangan KB (PLKB) Pos KB desa Akseptor KB	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada DINPERMASDES PPKR Kabupaten 2. Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Demak
	480	MEDIA MASSA Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media massa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat dan Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	480	Surat kabar Majalah Buletin Jurnal Press release, klarifikasi Berita, Press Statistik Perindustrian perdagangan termasuk 9 harga bahan baku pokok	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Informasi dan Komunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Demak
		Perekonomian dan perbankan Bidang lainnya Layanan informasi/ Leaflet Masukan analisis Gubernur Masukan analisis Bupati/Walikota Televisi Film Dokumenter Kewartawanan / Jurnalistik Pembentukan Organisasi Profesi Kasus-kasus kewartawanan Penyalahgunaan Profesi Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan jurnalistik khusus wartawan Temu Pers / Konferensi Pers Pers Tour Kunjungan Wartawan Asing Penyuluhan Masyarakat Publikasi Hubungan antar lembaga Non Pemerintah ( Wahana Komunikasi Masyarakat, Lembaga Lembaga pemerintah ( Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi /PID ) Pembinaan bidang Infokom Training Fotografi Training berita Jurnalistik Bintek Infokom				
	480	Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila Radio Pengawasan Lembaga Penyiaran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	480	Kelompok pemantau isi siaran Pengkajian isi Siaran SDM Penyiaran Periklanan Ketentuan Pemasangan reklame Pameran  Pendirian Informatian Center Pembinaan bidang Infokom Hubungan antar lembaga Non Pemerintah ( Wahana Komunikasi Masyarakat, Lembaga Lembaga pemerintah ( Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi /PID ) Luar Negeri Promosi Luar Negeri Kunjungan Wartawan Asing Fasilitas Peningkatan Pelayanan Informasi Sistem naskah sosialisasi kegiatan Kepala Daerah (Gubernur / Himpunan naskah sambutan, himpunan paparan, himpunan Dialog interaktif Rubrik Materi/ pointerSambutan, paparan, naskah Keynote Speaker, Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan Training berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom Rakor Pengendalian Kegiatan Pengelolaan Website Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Demak	Biasa/Terbuka	Pegguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Demak
	500	PEREKONOMIAN Dewan stabilisasi Pengadaan pangan Pengadaan sandang Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuatu bidang Klasifikasi pada masalahnya.	Biasa/Terbuka	Pegguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak  2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuatu bidang Klasifikasi pada masalahnya.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kabupaten Demak 1. Sekretariat, Bidang Perijinan, Bidang Penanaman Modal pada DINPMPTSP Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	510	PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	510	Promosi Perdagangan Pekan raya Pameran Event-event Pelelangan, distribusi Pemasaran sembako Pemasaran hasil industri Penentuan harga pokok Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Rencana dan Program Kerja Pelaksanaan Pelayanan Adminitrasi Pelaksanaan Teknis Pemantauan Evaluasi dan pelaporan Pemasaran Garam, minyak goreng, minyak tanah, sabun dan sebagainya. Pertokoan, kaki lima, kios	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Pusat perbelanjaan Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll) Penerbitan SIUP Perpanjangan Ijin prinsip Rekomendasi Perdagangan antar pulau Kerjasama bahan baku Industri pemasaran Kontrak Tera Tera Ulang Ukuran Takaran Timbangan dan anak timbangan Cap tanda tera Biaya tera	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perizinan pad DINPMPTSP Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	510	Kalibrasi Bantuan peralatan Proposal Surat Perjanjian/ kontrak Serah terima Perijinan/ rekomendasi tanda pabrik Kemetrologian Standart tingkat tiga Standart kerja satuan ukuran Ukuran metrologi Peralatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, UPTD Metrologi Legal pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
		Laboratorium metrologi Tanki ukur mobil Meter Taxi KWH Meter SPBU				
	510	Pasar Ekspor Ekspor hasil industri Ijin ekspor Pengembangan pasar luar negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perdagangan pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Managemen perdagangan internasional Ekspor hasil industri Kebijakan Pemasaran Pemberitahuan ekspor barang Pengawasan mutu barang Eksportir terdaftar Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	510	Standart Mata Dagang Import Managemen Perdagangan Internasional Kegiatan import Pembinaan import Pengendalian import Pemantauan Import Faktor-faktor pendukung Pengawasan mutu barang import Penyaluran kegiatan import Bahan konsumsi Bahan baku Bahan penolong Evaluasi dan pelaporan kegiatan import	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perdagangan pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	510	Perdagangan antar pulau Kerjasama bahan baku Industri pemasaran Kontrak Pengembangan Potensi Perdagangan Luar negeri Pengembangan potensi luar negeri Promosi dan Informasi Pameran Kerjasama Pergudangan Termasuk tanki penyimpanan minyak goreng Peti kemas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perdagangan pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak





NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kredit Program Khusus Distribusi dan jasa koperasi Distribusi dan bahan pokok Distribusi aneka bahan Distribusi kerjasama niaga Jasa angkutan Jasa perumahan Aneka jasa Koperasi kelistrikan, industri dan telekomunikasi Koperasi kelistrikan Koperasi industri Koperasi telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
		Organisasi Koperasi Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi Pemberian Badan Hukum Koperasi Penyelesaian Pembubaran Koperasi Perangkaan Koperasi Pengakuan Koperasi Sekolah Amalgamasi Tertib Organisasi Koperasi Penyelesaian Perselisihan/ Persengketaan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
		Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan Koprasi Indonesia (DEKOPIN) Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD )	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bina Tata Laksana Koperasi Klasifikasi Koperasi Pedesaan Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder Klasifikasi KUD Mandiri Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Adminitrasi Koperasi Perkotaan Karyawan/ Manager Koperasi Sumber Daya Manusia TKST (Tenaga Kerja Sukarela Terdidik) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda kepada Koperasi/ KUD Akuntansi Akuntansi KUD Akuntansi Koperasi Perkotaan Akuntansi Kopersai Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak  2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
		Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi Primer Pengawasan koperasi Sekunder Koperasi Jasa Audit Pengawasan Usaha Pengawasan Usaha Mikro	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak
		Pengawasan Usaha Kecil Pengawasan Usaha Menengah				2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kerjasama Kantor Akuntan Penyuluhan Koperasi Pembinaan Kader Koperasi Masyarakat Umum Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Menengah Kredit Usaha Kredit Usaha Kecil Kredit Usaha Menengah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada DINDAGKOP dan UKM Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	PERTANIAN Tanaman Pangan Rencana dan Program Bimas/ Inmas termasuk kredit Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Palawija Padi Panen Gagal ( Puso )	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikulture pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Hortikultural ( sayuran, buah-buahan, tanaman hias	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikulture pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Sarana Usaha Pertanian Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan Pembibitan Pupuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikulture pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak</p> <p>2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak</p>
	520	Irigasi Pertanian Rehabilitasi lahan Pertanian Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan Kebun Pengusaha, petani Lahan kritis/ KTA	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Sekretariat, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak</p> <p>2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak</p>
	520	Perlindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit tanaman pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama Tanaman Pangan Pemberantas Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<p>1. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak</p> <p>2. Subbagian Sumber</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Pemasaran dan Promosi Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikulture pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak</li> <li>2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak</li> </ol>
	520	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak</li> <li>2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak</li> </ol>
	520	Tata Kawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Perijinan pada DINPMPTSP Kabupaten Demak
	520	PERIKANAN DAN KELAUTAN Rencana , Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Perikanan dan Kelautan  Penyuluhan Teknologi Produksi Perikanan Standarisasi Mutu Hasil Perikanan	Biasa/Terbuka	kebijakan, pengawasan, penegak hukum  Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	kebijaksanaan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kabupaten Demak  1. Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan pada DINLUTKAN Kabupaten Demak  2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Perikanan budidaya : CBIB, CBIC Sertifikasi Kesehatan Ikan Usaha Perikanan Pelatihan Nelayan Pembinaan Wanita Nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan pada DINLUTKAN Kabupaten Demak  2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Fasilitas Perizinan Pembudidayaan Ikan (SIUP, SIPI, SKP dll) Pembenihan Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Eksport Hasil Perikanan Import Hasil perikanan Pemasaran dalam negeri Pengusaha perikanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan pada DINLUTKAN Kabupaten Demak  2. Subbagian Sumber

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Sarana Perikanan Pengendalian Hama dan Penyakit Penyakit Ikan Hama Ikan Obat-obat termasuk sertifikasinya				Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Pelabuhan Perikanan pantai TPI / PPI (Tempat penjualan ikan / Pusat Penjualan Ikan) Kesyahbandaran Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan, UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada DINLUTKAN 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Konservasi dan Suaka Laut Transplantasi Bibit Karang Terumbu karang Mangrove Garam Harta Karun didalam laut Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir Pengusaha, Nelayan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan pada DINLUTKAN Kabupaten Demak
		Kapal/ Motor boat Jaring Cold Storage Tempat Es				2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan	1. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Pengembangan



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Penyebaran dan pengembangan peternakan Budidaya Usaha Peternakan Pelayanan usaha Pengolahan hasil dan Pemasaran Pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan	Terbatas	pengawasan, penegak hukum	Daerah dan Pemerintah Desa	1. Pengembangan Ternak pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Promosi Produksi Peternakan Kesehatan Hewan Pengamatan dan penyidikan Penyakit Hewan Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan Obat-obat termasuk sertifikasinya Pelayanan kesehatan hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Pengembangan Ternak pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Hygiene dan Sanitasi Produk Hewani Laboratorium Kesehatan Hewan Pengujian Mutu asal hewan Pengujian mutu produk bahan asal hewan Standarisasi Bibit Ternak Inseminasi buatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Pengembangan Ternak pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Produksi Distribusi dan Pemasaran	Terbatas	Dibatasi hanya	Memiliki dampak	1. Bidang Peternakan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	PERKEBUNAN Program dan Pelaporan ( Pelaporan dan Evaluasi Perkebunan, Monitoring, Statistik perkebunan ) Produksi ( Karet, Teh, Tembakau, Tebu, Cengkeh, Kelapa/kopra/kelapa sawit , kopi, Kakao , jenis tanaman yang lain) Usaha perkebunan ( Pembibitan, Kelompok tani, Kemitraan ) Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan Perlindungan tanaman Hama Pestisida Pupuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Alat dan mesin perkebunan Power Sprayer Hand Sprayer Polibag Alat Laboratorium Perkebunan Reagen Sarana / Alat Produksi Perkebunan Pengolahan lahan Terasering Pemasyarakatan Penyuluhan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Sosialisasi Informasi Ketahanan Pangan Program Bimbingan Massal Pengembangan Sarana Sumber Daya Pembinaan Teknologi Sarana Produksi dan Permodalan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Agribisnis Mutu Hasil Pengelolaan Hasil pangan Pemasaran Hasil Kemitraan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	520	Distribusi pangan Sistem dan Pola Distribusi Sarana dan Prasarana Distribusi Pengadaan dan Cadangan Pangan Kewaspadaan dan keanekaragaman pangan Rawan pangan, keamanan dan mutu pangan Pola konsumsi pangan masyarakat Sistem informasi pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Penyuluhan Sumber Daya Manusia ( Penyuluh, Pelaku Utama Pelaku Usaha, Stake Holder ) Kelembagaan ( Struktural, Non struktural, Pelaku utama pelaku Penyelenggaraan Penyuluhan ( Program Metode, Promosi/Pameran/ Kampanye, Penghargaan / Lomba , Materi )	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	530	PERINDUSTRIAN Undang-undang gangguan Industri logam Industri Mesin/ Elektronik Industri Kimia/ Farmasi Industri Tekstil Industri makanan/ minuman	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perindustria pada DINAKERIND Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
	530	Aneka Industri/ Perusahaan Home Industri Aneka Kerajinan Kerajinan Rakyat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Perindustrian pada DINAKERIND Kabupaten Demak
		Usaha Negara Perjan Perum Persero Perusahaan Daerah				2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Minyak bumi/ Bensin Pengusahaan Perijinan Rekomendasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	540	Kontrak kerja  Pengelolaan Eksplorasi Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	2 Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak  1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak
		Energi Energi Alternatif Gas Rawa Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Biogas Energi Baru Terbarukan Perijinan Rekomendasi Teknis Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Pemetaan Energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)				2 Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	540	Pertambangan, Mineral dan Batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP Bantuan WIUP Bukan Logam WIUP Logam WIUP Batubara Rekomendasi Teknis Perijinan IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi Khusus	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak  2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
		IUP Operasi Produksi Khusus				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	540	Ijin Usaha Jasa Pertambangan Pencabutan Ijin Pembinaan Pengawasan Pengawasan Usaha Pertambangan Penerbitan Kegiatan Pertambangan  Pasca Tambang Reklamasi Penutupan Air Tanah Cekungan Air Tanah (CAT) Pemetaan CAT Imbuhan CAT Lepasana CAT Konservasi Pengendalian Daya Rusak Rekomendasi Teknis Sumur Artesis Sumur Bor Sumur Gali (Pasak) Pengusaha Pengebor (APATINDO) Sumur Pantau	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak  2. Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
		Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air Hidrologi Geologi Pemetaan Mitigasi Bencana Geologi Vulkanologi Pengawasan Vulkanologi Panas Bumi Hidrogeologi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	GERHUBUNGAN Perhubungan Darat Angkutan Jalan Raya Perizinan Terminal Alat Angkutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Angkutan dan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	550	Lalu Lintas Jalan Raya Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) Kecelakaan Lalu Lintas Jembatan timbang/ Lebih Muatan Uji Mutu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
	550	Lalu Lintas Jalan Sungai dan Danau Angkutan Sungai Keselamatan, Rambu-Rambu Lalu Lintas Alur dan Kolam Pelabuhan Trayek Sarana/ Kapal Pelabuhan Terminal Kecelakaan				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perizinan Perhubungan Laut Lalu Lintas Angkutan Laut Pelayaran Dalam Negeri				
		Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Haji Pelayaran Charter/ Wisata Turis Pelayaran khusus Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu Perkapalan – Alat Angkutan Kapal Penumpang Kapal Barang Kapal Perang/ Patroli/ Negara Kapal Tanker Pontol/ Tongkang Kapal Layar Kapal Layar Motor Kapal Kontainer Pelabuhan Alur Layar Dermaga Terminal Penumpang Terminal Kontainer Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus Pengerukan/ Perawatan Alur Pelayaran				
		Kolam Pelabuhan Reklamasi Pantai Dumping Area Pekerjaan Bawah Air (Salvage) Penjagaan Pantai Patroli Bandar Patroli Perairan Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan Di laut (GAMAT) Sertifikasi Kesempurnaan Kapal				



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	Sertifikasi Awak Kapal Kecelakaan Gangguan Kecelakaan Penumpang/ Kapal Kecelakaan Barang Gangguan Sarana Prasarana Pembajakan/ Penyelundupan Pencemaran Ijin Berlayar / Ijin pembangunan / Ijin Usaha				Kewenangan Pusat
	550	Perhubungan Udara Lalu Lintas Angkutan Udara Penerbangan Domestik Penerbangan Luar Negeri Penerbangan Haji Penerbangan Charter/ Non Reguler Penerbangan Khusus/ Jembatan Udara Pelabuhan Udara Tanah/ Lokasi Landasan Apron Terminal Penumpang Terminal Cargo Bangunan/ Gedung Perlengkapan Parkir Kendaraan Alat Angkutan Udara Pesawat Udara Dermaga				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Muatan Dalam Negeri Muatan Luar Negeri EMPU  Sertifikasi Kelayakan Kelayakan Pesawat Udara Kelayakan Peralatan Penunjang Kelayakan Personil/ Awak Kapal Keselamatan Rambu-Rambu Perakitan/ Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Telekomunikasi Penerbangan Asuransi Asosiasi SATPAM Rally Udara/ Lomba Perizinan Izin terbang/ Flight Approval Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan/ EMPU Pembukaan Kantor Cabang Rekomendasi Ketinggian Bangunan Pembangunan Bandar Udara Khusus				
	550	Pos Pembinaan Kebutuhan Fasilitas				Kewenangan pusat
		Rehabilitasi/ Perawatan Bina Usaha/ Pengawasan/ Penerbitan Standarisasi Perangkat Tanah/ Bangunan Filateli Asosiasi Laporan dan Evaluasi Pelayanan Jasa Pos Jasa Titipan				

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	550	Jasa giro Benda Pos/ Perangko Sampul Peringatan Jasa Pos Elektronik Perijinan Rekomendasi Usaha Jasa Pos/ Titipan Pembukaan Agen/ Cabang Gangguan Sarana dan Prasarana Kecelakaan Sabotase Penyelundupan				Kewenangan pusat
	550	Teknologi Informasi Kebijakan Peralatan Telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Informatika dan Persandian, Bidang Komunikasi dan Statistik pada DINKOMINFO Kabupaten Demak
	550	Internet/USO Telegram, Telex/SBB, Faximile Satelit, Stasiun Bumi Radio Komunikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Informatika dan Persandian, Bidang Komunikasi dan Statistik pada DINKOMINFO Kabupaten Demak
	550	Sistem Pembinaan/Penerbitan Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Informatika dan Persandian pada DINKOMINFO Kabupaten Demak
	550	Pariwisata dan Rekreasi Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pariwisata Usaha Jasa Biro perjalanan wisata Restoran dan Rumah Makan Izin Usaha Objek dan Atraksi Wisata Pengusahaan Objek dan Daya Tarik wisata	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak 2. Subbagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	Usaha Sarana Pariwisata Ijin Pariwisata Ijin Usaha Pariwisata Ijin Usaha Jasa Pariwisata Ijin Pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata Ijin Usaha Sarana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Bidang Promosi dan Pemasaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak 2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak
		Souvenir Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina) Tempat Rekreasi Objek dan Daya Tarik Wisata Ciptaan Tuhan Hasil Karya Manusia Rehabilitasi/ Perawatan Pengembangan Fasilitas Tanah/ Bangunan				
	550	Bina Usaha Institusi Asosiasi Lembaga Kepariwisataaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Sekretariat, Bidang Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	Meteorologi Curah Hujan Hujan Buatan Peneropongan Bintang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	2. Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Demak  Kewenangan Pusat
	560	TENAGA KERJA Data Permintaan TKI/ TKW Dari Luar Negeri Data Persediaan TKI/ TKW Dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI Rekrutmen Calon TKI/ TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/ TKW Berkas Persyaratan Calon TKI/ TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/ TKW Persyaratan Naker TKI/ TKW	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada DINAKERIND Kabupaten Demak
		Permohonan Rekomendasi Pasport Perjanjian Kerja TKI/ TKW Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/ TKW				
	560	Pemberangkatan Naker Pemberangkatan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/ TKW Ke Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/ TKW	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada DINAKERIND Kabupaten Demak
	560	Pemulangan Naker Kepulangan TKI/ TKW karena kontraknya habis Pemulangan TKI/ TKW Ilegal TKI/ TKW terkena kasus pidana Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan dan Produktivitas pada DINAKERIND Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/ Perluasan Kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga Penyalur Naker Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker antara Kerja lokal/ daerah Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/ BKS/ BKK) Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/ BKK/ BKS)				
	560	Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data Tenaga Kerja Asing Kecelakaan/ Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulangan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan dan Produktivitas pada DINAKERIND Kabupaten Demak
	570	PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan (joint venture)/ Penyertaan Modal Pasar uang dan Modal Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat , Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian pada DINPMPTSP Kabupaten Demak
	580	PERBANKAN MONETER Kredit Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas Polis Premi Tertanggung/ Pemegang Polis Uang Pertanggungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kewenangan pada Bagian Kredit Bank Jateng
	580	Investasi Tabungan ( Deposito,Tabanas, Taska, Tapelpram ) Deposito Tabanas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan	Kewenangan pada Bagian Pelayanan Bank Jateng

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Taska Tapelpram Bank Pembangunan Daerah Bank Jateng BKK, BPR BKK, Bank Pasar Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer		penegak hukum	Pemerintah Desa	
	590	AGRARIA Tata Guna Tanah Pengurusan hak-hak Tanah Guna Usaha Hak Guna Bangunan				Kewenangan pusat
	590	Pemetaan dan Pengukuran Perpetaan Penyediaan data, peta dan publikasi Fakta Tata Guna Tanah Tanah kritis Landreform Redistribusi Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian Penentuan Tanah Obyek Landreform Pembagian Tanah Landreform Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform Ganti Rugi Ganti rugi Tanah Kelebihan Sengketa Ganti rugi Tanah Kelebihan Ganti Rugi Tanah Absentee				Kewenangan Pusat
	590	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee Ganti Rugi Tanah Partikelir Sengketa Ganti Rugi Tanah Pertikelir Bagi Hasil Penetapan Imbangan Gadai Tanah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sengketa Perjanjian bagi Hasil Gadai Tanah Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah Pelaksanaan Gadai Tanah Sengketa Gadai Tanah Bimbingan dan Penyuluhan Pengembangan				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Yayasan Dana Landreform (YDL) Pengurusan Hak-Hak Tanah Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis Sewa Tanah Sewa Tanah untuk tanaman tertentu : Tebu, Tembakau Rosela, Corchorus Hak Milik Perorangan Badan Hukum Hak Pakai				
	590	Perorangan Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Badan Hukum Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing  Tanah Gedung-Gedung Negeri Guna Usaha Perkebunan Besar Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Kehutanan Hak Guna Bangunan Perorangan Badan Hukum P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda) Badan Hukum Asing Belanda – PBK No 5/ 56 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/ 1960) Hak Pengelolaan				Kewenangan Pusat
		PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate  Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan				



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	590	Sengketa Tanah Peradilan Perkara Tanah (Lihat juga 183) Pencabutan dan Pembebasan Tanah Pencabutan Hak Pembebasan Tanah Ganti Rugi Tanah Pendaftaran Tanah Pengukuran/ Pemetaan				Kewenangan Pusat
	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada <u>DINPUTARU Kabupaten</u>
	600	Arsitektur Bahan Bangunan Tanah dan Batu Aspal Besi dan Logam lainnya Besi Beton Besi profil (konstruksi) Paku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan pada <u>DINPUTARU Kabupaten Demak</u>

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	600	Aluminium Profil Bahan-bahan Perlindungan dan Pengawetan (Cat, tech oil, Semen Terhadap serangga Terhadap radiasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan pada DINPUTARU Kabupaten Demak
	600	Kayu Bahan Penutup Atap Alat-Alat Penggantung dan Pengunci Bahan-bahan Bangunan Lainnya Instalasi Instalasi bangunan Instalasi Listrik Instalasi Air/ Sanitasi Instalasi Pengatur Udara Instalasi akustik Instalasi cahaya/ penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap Gempa Terhadap angin/ udara/ panas Terhadap Kegaduhan Terhadap gas/ eksplosiv	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan pada DINPUTARU Kabupaten Demak
	610	PENGAIRAN Irigasi Bangunan Waduk Bendungan Tanggul Menara Pengambilan Pembangunan Dermaga Bangunan Pengambilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak
	610	Bendungan Bendungan dengan pintu bilas Bendung dengan pompa Pelimpahan Banjir Pengambilan bebas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	610	Kantung lumpur Silf Ekstretor Escape chenel Bangunan pembawa Saluran Saluran Induk Saluran Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak
	610	Suplesi Tersier Saluran Kwarter Saluran Pasangan Saluran tertutup/ terowongan Bangunan Bangunan bagi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak
	610	Bangunan bagi dan sadap Bangunan sadap Bangunan chek Bangunan terjun Bax tersier Got miring Talang Syphon Gotong-gorong Pelimpahan samping Bangunan Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan Induk Saluran Pembuang Sekunder Saluran Pembuang Tersier Bangunan Bangunan Out Let Bangunan Terjun Bangunan penahan banjir	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	610	Gorong-gorong pembuang Talang Pembuang Sypon pembuang Bangunan lainnya Jalan Jalan Inspeksi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Bina Marga, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak
	610	Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jembatan hewan Tangga cuci Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan penunjang Jaringan telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Bina Marga, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak
		Stasiun Argo Bangunan TPI dan Pasar Ikan Polder Tanggul keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan Pembawa Saluran Saluran Muka Saluran Pembawa Induk Saluran Pembawa Sekunder Saluran Stasiun Pompa Pembuangan Bangunan Bagi : Gorong-gorong				
		Syphon Bangunan Pembuangan Stasiun Pompa Pembuangan Saluran Saluran Pembawa Induk Saluran Pembawa Sekunder				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pintu Air Pembuangan Gorong-gorong Pembuangan Syphon Pembuangan Bangunan Lainnya Bangunan Bangunan Pengukur Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang surut Bangunan pembawa Saluran Pembawa Induk Saluran Pembawa Sekunder Saluran Pembawa Tersier Saluran Penyimpanan Air Saluran Pintu Pembuangan				
	610	Kolom Pasang Saluran Saluran Lalu Lintas Saluran Muka Bangunan Bangunan Penangkis Kotoran Bangunan Pengukur Muka Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Jalan Jembatan Pengendalian Sungai Bangunan Pengaman	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Bina Marga, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Tanggul Banjir Pintu Pengatur Banjir Klep Pengatur Banjir Tembok Pengaman Talut Krib				
		Kantung Lumpur Chek Dam Sypon Saluran Pengaman Saluran Banjir Saluran Drainage Corepure Bangunan lainnya Warning System Stasiun, Stasiun Pompa Stasiun Pengukur Curah Hujan Stasiun Pengukur Air Stasiun Pengukur Cuaca Stasiun Pos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul Krib Bangunan lainnya Air Permukaan (Danau,Waduk,Sungai)				
	620	JALAN Jalan Kota Daerah Penguasaan Tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Bina Marga pada DINPUTARU Kabupaten Demak
	630	Bangunan Bangunan Sementara Jalan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan Rumah Badan Jalan Pekerjaan tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan	Terbatas          Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum          Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa          Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan	Bidang Bina Marga pada DINPUTARU Kabupaten Demak          Bidang Bina Marga , Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Lapisan Pondasi Bawah Lapisan Pondasi Lapisan Permukaan Drainage Parit Tanah Gorong-gorong (culvert) Buku Trotoir Tanah Perkerasan Pasangan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan		penegak hukum	Pemerintah Desa	DINPUTARU Kabupaten Demak
		Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengatur Lalu Lintas Patok-patok KM Patok-patok ROW (Sempadan) Rel Pengaman Pagar Turap Penahan Bronjong Jalan Provinsi Daerah Penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/ gedung proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan (pavemen)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kewenangan Pemerintah Propinsi  Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertamanan pada DINPUTARU Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Lapis pondasi bawah Lapis pondasi Lapis permukaan Drainage Parit Gorong-gorong (culver) Buku Trotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu-rambu Lampu Penerangan Lampu Pengatur Lalu Lintas patok-patok KM Patok-patok ROW (sempadan) Rel Pengaman Pagar Turap Penahan Bronjong Daerah Penguasaan Badan Jalan				
		Jalan Nasional Perkerasan (Lapis Pondasi, Lapis Permukaan) Drainase (Gorong-gorong, Parit) Median Daerah samping Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan (Rambu-rambu)				Kewenangan Pusat
	630	JEMBATAN Jembatan Pada Jalan Kota/Kabupaten Daerah penguasaan Tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan.	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan	Bidang Bina Marga , Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan pada





NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Patok pengaman Patok ROW (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage  Baku Median Jembatan Pada Jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan Sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak Kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan Tanah (earth work) Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi Kepala Jembatan Pondasi Pilar Pondasi Angker Bangunan Bawah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Bina Marga pada DINPUTARU Kabupaten Demak
		Kepala Jembatan Pilar Piloon Landasan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan Orang/ trotoir Sandaran Talang Air Bangunan Pengaman Turap/ penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan Pelengkap Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas Patok Pengamanan Patok ROW (sempadan) Oprit				
	640	BANGUNAN Bangunan Pemerintah : Gedung Pengadilan, Rumah Pejabat Negara, Bangunan Pendidikan : Taman Kanak-kanak, SD&Sekolah Bangunan Rekreasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan	1. Bidang Tata Ruang Bangunan, dan Pertanahan pada 2. Bidang Perumahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian, Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan : Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan  Bank Perkantoran Bangunan Pelayanan Umum : Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum  Gedung Parkir Rumah Sakit Gedung Telkom		penegak hukum	Pemerintah Desa	pada DINPERKIM Kabupaten Demak
	650	TATA RUANG KOTA Daerah perdagangan/ pelabuhan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Perumahan pada DINPERKIM Kabupaten Demak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah Perumahan (site & survey) Kepadatan Rendah (Low Density) Kepadatan Tinggi (High Density) Daerah Industri Industri Berat Industri Ringan Industri Rumah (Home Industri) Daerah Rekreasi (open Spece) Publik Garden Sport & Playing Fields Open Spase Transportasi Jaringan Jalan Penerangan Jalan Jaringan Kereta Api	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada DINPUTARU Kabupaten Demak
	660	TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Sekretariat, Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Tanah Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan Lingkungan Konservasi Pesisir dan Laut Konservasi Sumber Daya Alam		pengawasan, penegak hukum	Daerah dan Pemerintah Desa	Kabupaten Demak
		Pentaatan Hukum Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air, Udara, Tanah Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengamanan Lingkungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sekretariat / Subbagian Umum dan Kepegawaian pada 1. DINPUTARU Kabupaten Demak 2. DINPERKIM Kabupaten Demak
	700	PENGAWASAN Kebijakan dan Program Pengawasan Pengawasan Perencanaan Pengadaan/ proyek Pengawasan Inventarisasi Asset Pengawasan Organisasi dan tata laksana Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen Pengawasan Penelitian/Riset Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi  Pengawasan Pertanahan/BPN	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
	710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan Pemerintahan Provinsi Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
	720	BIDANG POLITIK Pengawasan Partai termasuk pendanaan Partai, atribut Partai,dll	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu	1. Irbanwil pada Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud hankam Pengawasan Organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME		kebijakan, nengawasan.	kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
	730	BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengawasan Pembangunan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Kebudayaan Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat Pengawasan SARA (suku agama ras) Pengawasan Kesejahteraan Sosial Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi Pengawasan Kehumasan Media massa dan Penyiaran Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
	750	BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Perdagangan dan perindustrian Pengawasan Peetanian dan Perkebunan Pengawasan kehutanan Pengawasan Pertambangan/ESDM Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketramigrasian Pengawasan PMDN/PMA Pengawasan Perbankan/ Moneter Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan Pengawasan Jembatan Pengawasan Bangunan Pengawasan Tata Ruang Kota Pengawasan Tata Lingkungan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan Ketenagaan Pengawasan Air Minum				masing masing Perangkat Daerah
	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
	780	BIDANG KEPEGAWAIAN Pengawasan Pengadaan PNS Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS Keanggotaan PNS dalam Parpol Penyimpangan Pejabat/PNS Persengketaan PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
	790	BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perbendaharaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	1. Irbanwil pada Inspektorat Kabupaten Demak 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Subbagian Umum dan Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah
<b>II. KEPEGAWAIAN</b>						
	800	Kepegawaian a. Perencanaan b. Penelitian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa	Sekretariat , Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak
		c. Statistik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa	Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak



<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	810	Pengadaan a. Pendaftaran CPNS (Testing, Screening, Pengumuman Tes dan Pemanggilan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari Eksternal dan Internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa	Bidang Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi pada BKPP Kabupaten Demak
		b. Pengujian Kesehatan c. Pengangkatan CPNS (Pengangkatan CPNS Golongan I, II, dan III)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	

BUPATI DEMAK

ttd

HM. NATSIR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 80 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KETENTUAN PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA PENYIMPANAN ARSIP DINAMIS

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	PRASARANA DAN SARANA	ARSIP	PENGGUNA	PRASARANA DAN SARANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.
2	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.	a. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip;  b. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	a. Autentikasi server;  b. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus; c. Firewall dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	PRASARANA DAN SARANA	ARSIP	PENGGUNA	PRASARANA DAN SARANA
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Diperlukan prasarana dan sarana khusus.	a. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip; b. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	a. Autentifikasi server; b. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus; c. Firewall serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.
4	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur sangat rahasia dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Diperlukan prasarana dan sarana khusus.	a. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip; b. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	a. Autentifikasi server; b. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus; c. Firewall serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi

BUPATI DEMAK

ttd

HM. NATSIR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 80 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PROSEDUR PENGIRIMAN ARSIP DINAMIS  
 BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

NO.	TINGKAT/ KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1	2	3	4
1	Biasa/ Terbuka	tidak ada persyaratan prosedur khusus.	tidak ada prosedur khusus.
2	Terbatas	amplop bersegel.	apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain-lain.
3	Rahasia	a. menggunakan warna kertas yang berbeda; b. diberi kode rahasia; c. menggunakan amplop dobel; d. amplop segel, stempel rahasia; e. konfirmasi tanda terima; f. harus dikirim melalui orang/pegawai yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.	a. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email; b. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia; c. menggunakan persandian atau kriptografi; d. harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.
4	Sangat Rahasia	a. menggunakan warna kertas yang berbeda; b. diberi kode sangat rahasia; c. menggunakan amplop dobel; d. amplop segel, stempel sangat rahasia; e. konfirmasi tanda terima; f. harus dikirim melalui orang/pegawai yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.	a. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email; b. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email sangat rahasia; c. menggunakan persandian atau kriptografi; d. harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.

BUPATI DEMAK

ttd

HM. NATSIR